

OPINI

Saintek Pendidikan Berbasis Budaya Lokal

PENDIDIKAN harus mempunyai kontribusi yang bermakna bagi pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang berlangsung di Indonesia merupakan investasi terhadap pembangunan bangsa dan negara, baik sekarang maupun yang akan datang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas mengatur masalah tersebut. Undang-undang ini mendukung pelaksanaan reformasi pendidikan di Indonesia.

Sementara itu, dalam rangka mencerdaskan bangsa, pelaksanaan pendidikan dari pusat sampai daerah, karena semangat bangsa dan negara (Pancasila) dan filsafat daerah, karena semangat moral bangsa dan negara dalam membangun bangsa melalui daerah-daerah itu dapat berjalan dengan baik manakala tidak terjadi konflik filosofis antara filsafat bangsa dengan filsafat di daerah masing-masing (Huda, 2010:10).

Apakah paradigma pendidik sudah sesuai dengan amanat dari undang-undang tersebut? Sepertinya belum sesuai karena paradigma pendidik masih pengajaran dengan menerapkan *teacher center learning* (TCL), yakni pembelajaran yang berpusat pada guru dan belum berubah menjadi *student center learning* (SCL) di mana murid menjadi pusat pembelajaran. Hal apa kiranya yang membuat kita enggan untuk

mengubah paradigma menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (SCL)?

Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia sejak tahun 2020 telah memaksa pendidik untuk mengubah paradigma mereka. Guru dan dosen dipaksa untuk melakukan pembelajaran daring sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kesehatan dan keamanan semua orang sehingga virus Covid-19 bisa sedikit ditekan. Pendidik dituntut untuk lebih melek teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran.

Reformasi pendidikan di Indonesia didasari salah satunya adalah falsafah Ki Hadjar Dewantara tentang pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Beberapa falsafah yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara (Tilaar, 2002) berkenaan dengan pendidikan berwawasan kemasyarakatan adalah: (1) segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya, (2) kodratnya tersimpan dalam adat istiadat setiap masyarakat dengan berbagai kekhasan, yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencapai hidup tertib dan damai, (3) adat istiadat sifatnya selalu berubah (dinamis), (4) untuk mengetahui karakteristik saat ini diperlukan kajian mendalam tentang kehidupan masyarakat tersebut di masa lampau sehingga dapat diprediksi kehidupan yang akan

datang pada masyarakat tersebut, dan (5) perkembangan budaya masyarakat akan dipengaruhi oleh unsur-unsur lain, hal ini terjadi karena pergaulan antar bangsa. Pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia tersebut mampu meramalkan apa yang akan terjadi berpuluh-puluh tahun yang akan datang yaitu terjadinya globalisasi. Sejatinya beliau telah memberi petunjuk jalan pendidikan bagi bangsa ini yang sangat luar biasa.

Dasar hukum terkait dengan reformasi pendidikan di Indonesia yang sejalan dengan prinsip desentralisasi adalah: (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntun pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 50 Ayat 5 menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Sonhadji dalam Huda (2010), menjelaskan bahwa dalam melaksanakan reformasi manajemen pendidikan di Indonesia perlu diperhatikan delapan hal berikut: (1) Filosofi pendidikan tetap Pancasila, (2) Tujuan pendidikan nasional harus dicapai secara konsisten, sedangkan tujuan untuk ma-



Oleh: Dr ASRI WIDIATSIH
SPd MPd*)

masing jenis pendidikan disesuaikan dengan karakteristik pendidikan dan daerah yang bersangkutan, (3) Strategi yang digunakan adalah pemberdayaan (*empowerment*) bagi setiap lembaga dan pelaku pendidikan dengan merujuk pada kepentingan pemerataan pendidikan kualitas, relevansi, dan efisiensi, (4) Perencanaannya menggunakan pendekatan strategis (*strategic planning*) dan perencanaan operasional (*operational planning*), (5) Struktur yang digunakan ramping dan desentralisasi, (6) Profesionalisme merupakan sumber daya manusia, (7) Pengarahan dan pembinaan dilakukan secara kontinu, profesional, demokratis, dan bukan pembinaan yang sporadis, politis, dan indoktrinatif, (8) Pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan kendali mutu (*total quality management*) dalam

budaya yang berbeda.

Sekolah bisa menangkap kearifan lokal dengan memahami bagaimana cara masyarakat menyikapi "sesuatu" berdasarkan budaya setempat. Seperti masyarakat etnis Madura yang ada di Jember mengenal ungkapan "*bupha, babhu, guru, dan rato*". Ungkapan ini menjadi pedoman hidup mereka untuk berperilaku berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal bersesuaian dengan Landasan Aksiologis Filsafat Pancasila dengan bentuk yang berbeda di setiap daerah yang merupakan nilai kerohanian Bangsa Indonesia (Widiatsih, 2015). Reformasi pendidikan berbasis budaya lokal dilakukan dengan pengintegrasian kearifan lokal dalam program hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengintegrasian kearifan lokal dalam program hubungan sekolah dengan masyarakat melalui program pembelajaran, program kemanusiaan, program kebudayaan, dan program kemitraan.

Pengintegrasian kearifan lokal dalam pembelajaran dilakukan melalui kurikulum ideal (*ideal curriculum*) dan kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Penerapan di sekolah bisa melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler yang diterapkan adalah pembiasaan yang dilakukan di sekolah sesuai dengan

masyarakat sekitarnya. Misalnya masyarakat sekitar mayoritas beragama Islam, maka sekolah perlu merayakan hari besar umat muslim. Kokurikuler dilakukan dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kegiatan pembelajaran di kelas, seperti guru bisa memberi contoh nyata yang diambil dari lingkungan sekitar siswa. Ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran, di mana jenisnya disesuaikan dengan daerah sekitarnya. Misalnya di Jember, maka dipilih kegiatan seni tari berartian yang diajarkan adalah tari yang menjadi ciri khas Jember atau Jawa Timur.

Kedudukan konsep sains, teknologi, dan masyarakat semakin penting dalam era masyarakat modern yang banyak menimbulkan masalah-masalah kompleks. Kenyataan ini akan semakin dirasakan apabila dianalisis lebih jauh bahwa pemecahan masalah-masalah tersebut menghendaki adanya dukungan dari berbagai disiplin ilmu (Winataputra, 2014). Menurut dia, sains, teknologi, dan masyarakat (STM) adalah konsep yang digunakan sebagai cara untuk memberikan wawasan kepada siswa secara nyata dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Ciri dasar eksistensi STM adalah lahirnya warga negara yang berpengetahuan yang mampu memecahkan masalah-masalah krusial dan meng-

ambil tindakan secara efisien dan efektif.

Warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sains dan teknologi. Mereka harus memahami bahwa masalah-masalah sosial yang kompleks yang berkaitan dengan sains dan teknologi dapat menimbulkan masalah ketidakjelasan nilai yang "benar" dan nilai yang "salah" di masyarakat.

Penggunaan langkah-langkah pengambilan keputusan yang sistematis dalam mempelajari isu-isu sains, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS dapat membantu mengembangkan intelektual siswa, kemampuan memecahkan masalah (*problem-solving skills*), dan kemampuan berfikir dalam mengambil keputusan secara fleksibel namun terorganisasi. Guru-guru IPS dapat membelajarkan siswanya menggunakan langkah-langkah sistematis dengan cara menganalisis isu-isu ilmu, teknologi, dan masyarakat, maka mereka membantu siswanya belajar bagaimana mengaitkan antar bermacam-macam disiplin ilmu dengan IPS.

*) Penulis adalah Wakil Dekan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Argopuro Jember (Unipar), sekaligus penulis buku *Reformasi Pendidikan Berbasis Budaya Lokal*.